

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Indrawati (2012)**

Penelitian Indrawati (2012) yang berjudul “Analisis Efisiensi dan efektifitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011” merupakan penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X adalah pajak hotel dan pajak restoran dan variabel Y adalah pendatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Malang pada tahun 2007-2011 mengalami penurunan setiap tahunnya. Realisasi dan potensi pajak hotel dan restoran mengalami kenaikan dan berbanding terbalik dengan efektifitas penerimaannya yang mengalami penurunan pada 5 tahun tersebut.

##### **2. Lupitasari (2011)**

Penelitian Lana (2011) yang berjudul “Evaluasi Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran sebagai Usaha Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar” merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi

kasus. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan persentase dan dilanjutkan dengan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan data secara lebih mendalam. Perhitungan persentase tersebut meliputi laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran dan perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis data, efektivitas pajak hotel dan restoran pada tahun 2005-2009 menunjukkan tidak efektif. Rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah hanya sebesar 1,20%.

### **3. Lalityasari (2014)**

Penelitian Ayu (2014) yang berjudul “Efek Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu” merupakan penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel X (pajak hotel dan restoran) dan variabel Y (pendapatan pajak daerah). Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran secara dominan mempengaruhi pendapatan pajak daerah. Semakin besar pajak hotel dan restoran yang diterima maka akan mengakibatkan pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan yang juga diiringi dengan peningkatan pada pendapatan asli daerah.

**Tabel 2: Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Indrawati	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	Penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif	Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Malang pada tahun 2007-2011 mengalami penurunan setiap tahunnya	Mengarah ke efektivitas penerimaan Pajak terhadap PAD dari kurun waktu 5 tahun	Tidak meneliti Pajak Restoran melainkan Hanya meneliti Pajak Hotel
2	Lupitasari	Evaluasi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran sebagai Usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar	Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan studi kasus	Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2005-2009 menunjukkan tidak efektif	1. Menggunakan penelitian Deskriptif 2. sama- sama melihat efektivitas dan perhitungan kontribusi terhadap PAD 3. dan dalam kurun waktu 5 tahun	1. tidak menggunakan Pajak Restoran 2. studi kasus berbeda antara kota Kediri dan Kota Blitar
3	Lalityasari	Efek Pajak Hotel dan Restoran sebagai Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu	Penelitian explanatory pendekatan kuantitatif	Pajak hotel dan restoran secara dominan mempengaruhi pendapatan daerah	Sama- sama menggunakan kurun waktu 5 tahun	1. Dari studi kasus yang berbeda Kota dan Kabupaten 2. metode penelitian

## **B. Otonomi Daerah**

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan-perundangan yang berlaku”. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 6 Daerah Otonom, selanjutnya yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip dalam menyelenggarakan otonomi daerah dibagi menjadi tiga yang sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah yang tertera pada penjelasan umum sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya, berarti daerah diberikan wewenang mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

2. Prinsip otonomi nyata, berarti bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kebahasaan daerah.
3. Prinsip otonomi bertanggung jawab, hal ini berarti otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

### **1. Dasar Hukum Otonomi Daerah**

Dasar hukum otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat, yakni:

#### **a) Undang-Undang Dasar**

Sebagaimana telah disebut diatas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintah pusat dan daerah.

#### **b) Ketetapan MPR-RI**

TAP MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang

berkeadilan, serta perimbangan kekuasaan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketiga dasar perundang-undangan tersebut diatas tidak diragukan lagi bahwa pelaksana Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal oleh masing-masing daerah.

## **2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

- b) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi terbatas.
- d) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- f) Kawasan khusus yang dibina Pemerintah atau pihak lain seperti kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
- g) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- h) Pelaksanaan atas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

- i) Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintahan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsep otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa saat itu.

### **C. Pendapatan Asli Daerah**

#### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Daerah otonom dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung pada pemerintahan pusat. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuannya sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekuasaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan



sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber keuangan yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Kuncoro (2011:51) pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibanding dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintahan (non-pendapatan asli daerah) sifatnya lebih terikat. Penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diukur yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD (Sidik, 2002:15).

## 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sidik (2002:8) tuntutan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Pemerintahan daerah sering kali dihadapkan pada masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah sementara kapasitas fiskal daerah tersebut tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan kesenjangan fiskal manajemen pendapatan asli daerah terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal perlu dilakukan manajemen pengeluaran secara komprehensif, salah satunya adalah dengan membuat standart biaya. Beberapa strategi pemerintahan daerah untuk menutup kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh Mardiasmoro (2004:147) adalah sebagai berikut:

- a) Harus disadari bahwa tidak ada semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan pemerintah daerah seharusnya menguji belanja dan biaya yang terjadi. Barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau bahkan tidak perlu dilaksanakan.
- b) Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui *charging for service* (penjualan jasa publik)
- c) Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan melalui daerah (*revenue administration*) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.

- d) Kemungkinan menaikkan pajak melalui peningkatan tarif dan perluasan subjek dan objek pajak.

### **3. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Wujud intensifikasi adalah satu sisi meningkatkan penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diserahkan kepada daerah. Menurut Dedy (2007:22), upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek personalia yang pelaksanaannya melalui:

- a. Memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (Dinas Pendapatan Pajak), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.
- b. Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
  1. Penyempurnaan administrasi pungutan
  2. Penyesuaian tarif
  3. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian
- d. Meningkatkan sumber daya manusia pengelolaan PAD, dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak maupun retribusi.

#### **4. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu yang perlu dianalisa untuk mengetahui potensi sumber pendapatan asli daerah adalah peningkatan cakupan atau ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan asli daerah, menurut Simanjuntak (2008:51) ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini adalah:

- a) Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi
- b) Meningkatkan besarnya pendapatan. Dalam hal ini perlu diperhatikan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya pendapatan pajak dan retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
- c) Mengurangi tunggakan. Untuk hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan rekening, kemudian diambil langkah-langkah konkret yang sesuai untuk mengurangi rekening tunggakan yang ada dan mencegah terjadinya tunggakan baru.

## **D. Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridisnya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkan. Pajak daerah ini diatur dalam peraturan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Kuncoro,2011:34).

## **2. Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah sebagai sumber pemerintahan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah sekarang ini. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan Undang-Undang, khususnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Penetapan pajak daerah sebagai penerimaan daerah ini dapat dilihat pada berbagai undang-undang dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Menurut (Siahaan, 2005:12) dalam bukunya antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1948 tentang Pemerintahan daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- f. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berbagai Undang-Undang yang disebutkan di atas, dalam setiap isinya menerangkan bahwa pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah dan di khususkan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Indonesia merdeka sampai saat ini pajak telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah, yang dimana sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak daerah dimasukan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Disini diketahui bahwa pajak merupakan penerimaan yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

## **E. Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Soemohamijaya ( 2008:5) . Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut UU Perpajakan Nasional. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum ( rutin) dan pembangunan.

## **2. Dasar Hukum Pajak**

Dasar hukum pemungutan pajak Hotel di Indonesia antara lain:

- a) Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Pajak Hotel diatur dalam Pasal 38-Pasal 42)
- c) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
- d) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota dimaksud.
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Daerah



- h) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

## **F. Definisi Pajak Hotel**

### **1. Pajak Hotel**

Dalam Perda Kota Kediri No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri Pasal 1, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel disini fasilitas penyediaan jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2008:245).

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam peraturan daerah No. 6 Tahun 2010 tentang pajak hotel pada pasal 4 dijelaskan mengenai objek, subjek, wajib dan bukan objek pajak hotel sebagai berikut:

- a) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan dengan pembayaran yang disediakan oleh hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- b) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faximile, telex, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- c) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - 1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
  - 2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
  - 3. Penyewaan tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
  - 4. Penyewaan tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
  - 5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum .
- d) Dalam penyelenggaraan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- e) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

- f) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

## **2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel menurut perda pajak hotel pasal 6 adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pergantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kotayang bersangkutan. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besar tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asal tidak lebih dari sepuluh persen.

Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada hotel, Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin Cash Register, wajib memasukkan program pengenaan pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dan kepada konsumen diberikan Nota Cash Register sebagai bukti pembayarannya.

## **3. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel**

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT).

Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

a) Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang pajak hotel. Untuk itu Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Walikota. Permohonan memperpanjang waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPTPD dianggap tidak dimasukkan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

b) Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walau kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses

pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan wajib pajak, kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

c) Penetapan pajak hotel

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 30 sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

d) Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

e) Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu 1 (satu) bulan takwim. Pembayaran pajak yang terutang

dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

f) Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu yang ada dalam surat teguran atau

surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, pencegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.

g) Keberatan

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh walikota, dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak hotel dimaksud. Keputusan yang diterbitkan oleh walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## G. Efektivitas Pajak Hotel

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah imbangan antara pendapatan yang sebenarnya terhadap pendapatan potensial dari satu pajak dengan anggaran bahwa yang seharusnya dibayarkan benar-benar memenuhi kewajibannya. Efektivitas didalam perpajakan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan ( halim,2004:135) Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah.

### 2. Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan pengertian, efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil terhadap target. Dengan begitu jika konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak hotel mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak hotel yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 ( satu ) atau 100% . Adapaun rumus dan tabel krtiteria efektivitas di bawah ini.

$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target penerimaan Pajak Hotel}}$
---



### Kriteria Efektivitas Pajak Hotel

<b>Persentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>&gt;100%</b>	<b>Sangat Efektif</b>
<b>90%-100%</b>	<b>Efektif</b>
<b>80%-90%</b>	<b>Cukup Efektif</b>
<b>60%-80%</b>	<b>Kurang Efektif</b>
<b>&lt;60%</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Sumber: depdagri,kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

### H. Pengertian Kontribusi Pajak Hotel

Menurut Abdul halim (2001:163) kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Hal ini senada dengan dikemukakan Daud Halim (2004:163)

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100 \%$$

Keterangan:

$P_n$  : Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

$QX_n$  : Jumlah realisasi penerimaan pajak hotel (rupiah)

$QY_n$  : Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah (rupiah)

$N$  : Tahun (periode) tertentu.

Dibawah ini diberikan kriteria kontribusi:

**Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
<b>Rasio 0 - 10,00</b>	<b>Sangat Kurang</b>
<b>Rasio 10,10 – 20,00</b>	<b>Kurang</b>
<b>Rasio 20,10 – 30, 00</b>	<b>Cukup</b>
<b>Rasio 30,10 – 40,00</b>	<b>Sedang</b>
<b>Rasio 40,10 – 50,00</b>	<b>Baik</b>
<b>Rasio &gt;50,00</b>	<b>Sangat Baik</b>

*Sumber : depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996*